

# **WINNING STRATEGIES OF INDONESIAN COMMUNIST PARTY (PKI) IN THE GENERAL ELECTION OF 1955 IN YOGYAKARTA**

By : Barep Rifaldi Chandra Perdana  
12407141014

## **Abstract**

Madiun Affair conducted by the Indonesian Communist Party (PKI) made an impression in the minds of the people of Indonesia. Which resulted, a bad image on the PKI as a party rebel. In 1950, PKI consolidated and arose under the leadership Dipa Nusantara Aidit. Liberal democracy has provided an opportunity for the PKI to participate in national politics. PKI has been able to become a winner the General election of 1955 in Yogyakarta. PKI has been able to take triumph over the general election of 1955 in Yogyakarta. in general, the economic situation of the community in Yogyakarta were below the poverty line. Under the leadership of Aidit and his colleagues, the PKI has implemented a more moderate way by means of consolidating the organization, through approach to the villages which include farmers, workers, women and youth. This approach is called the Method of Combining the Three Forms of Struggle. PKI has won in Gunungkidul regency and Yogyakarta city. Accumulatively PKI has excelled in the vote in the province of Yogyakarta. Optimization of a good campaign and propaganda of PKI has been able to attract the sympathy of the people with the result that they got the great support in the general election of 1955 in Yogyakarta.

**Keywords : PKI, Election, Yogyakarta.**

# STRATEGI PEMENANGAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA PADA PEMILU TAHUN 1955 DI YOGYAKARTA

Oleh: Barep Rifaldi Chandra Perdana  
12407141014

## Abstrak

*Madiun Affair* yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat membekas dalam benak rakyat Indonesia. Akibatnya, PKI mendapat citra buruk sebagai partai pemberontak. Pada tahun 1950, PKI melakukan konsolidasi dan bangkit dibawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit. Demokrasi Liberal memberikan kesempatan bagi PKI untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan nasional. PKI mampu menjadi pemenang dalam pemilihan umum 1955 di Yogyakarta. Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Yogyakarta berada di garis kemiskinan. PKI dibawah Aidit dan kawan-kawannya menerapkan strategi yang lebih moderat dengan cara melakukan konsolidasi organisasi, pendekatan ke desa-desa yang meliputi petani, buruh, wanita dan pemuda desa. Pendekatan tersebut dinamakan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan. PKI berhasil menang di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Secara akumulatif PKI unggul dalam perolehan suara di Provinsi Yogyakarta. Optimalisasi kampanye dan propaganda yang baik dari PKI mampu menarik simpati rakyat sehingga mendapat dukungan yang besar pada pemilihan umum 1955 di Yogyakarta.

**Kata Kunci:** PKI, Pemilu, Yogyakarta.

## A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 September 1948 Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan aksi *Madiun Affair*.<sup>1</sup> Dalam aksi tersebut para pejabat, perwira, prajurit, lurah, *kyai*, santri dan masyarakat yang anti komunis menjadi korban kekerasan PKI.<sup>2</sup> Pemerintah menumpas pemberontakan tersebut dan menyebabkan pertempuran yang menewaskan *kaum* Komunis sebanyak sekitar

---

<sup>1</sup> *Madiun Affair* adalah suatu gerakan PKI untuk mendirikan negara Sovyet Indonesia yang bertujuan mengganti ideologi pancasila dengan paham komunis. Peristiwa ini terjadi antara bulan September sampai dengan Desember 1948 di Kabupaten Madiun, Magetan, Kediri, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, Wonogiri, dan Purwodadi. Maksum, dkk, "*Lubang-Lubang Pembantaian Petualangan PKI di Madiun*", (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hlm. ix.

<sup>2</sup> Jusuf Badri, *Inilah Komunisme dan Agama Komunis*, (Jakarta: Restu Agung, 2001), hlm 283.

8.000 orang. Para pimpinan PKI dibalik peristiwa tersebut sempat melarikan diri ke beberapa tempat dan baru berhasil ditangkap 1 bulan pasca pemberontakan. Muso selaku dalang dibalik peristiwa Madiun ditembak mati.

Pasca peristiwa tersebut, Republik Indonesia disibukkan dengan Agresi Militer Belanda II. Upaya rekonsiliasi partai pasca pemberontakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Tindakan hukum kepada PKI sebagai partai tidak dilakukan. Fokus pemerintah dalam menyatukan kekuatan untuk melawan agresi militer Belanda II menyebabkan penanganan terhadap *Madiun Affair* PKI berjalan kurang maksimal. Sesudah keadaan kembali normal, pemimpin-pemimpin muda PKI berusaha mengonsolidasi partainya dan mulai mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia tidak bersalah.<sup>3</sup>

Alimin mengaktifkan kembali PKI pada tanggal 4 Februari 1950. Kepemimpinan Alimin tidak bertahan lama karena digantikan oleh Dipa Nusantara Aidit (D.N. Aidit) yang datang kembali ke Indonesia setelah mengasingkan diri ke Cina. Aidit melakukan penyatuan kembali seluruh kekuatan dan potensi yang ada di partai. Kepemimpinan Aidit semakin kuat karena dukungan tokoh-tokoh pemudanya yang berhasil mengembangkan PKI. Aidit berhasil merehabilitasi PKI pada masa Demokrasi Liberal. Aidit dan kawan-kawannya sepakat mengadakan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan politik yang dianggap penting untuk memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan. Demokrasi Liberal di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1950-1959, memberikan kesempatan bagi PKI untuk ikut berpartisipasi dalam politik meskipun sebelumnya PKI telah terlibat dalam Pemberontakan Madiun 1948.

Kegagalan dalam peristiwa kudeta di Madiun tahun 1948 menyebabkan kemunduran di tubuh PKI. Banyak tokoh-tokohnya yang tewas, dipenjara dan bersembunyi. Pada masa-masa itu PKI semakin hancur. Ketidakstabilan negara pasca agresi militer Belanda II turut membuat konsentrasi pemerintah terhadap PKI menurun sehingga tindak lanjut secara hukum masih belum dapat diberikan. Pada tahun 1950 pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan dengan tidak

---

<sup>3</sup> MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2009), hlm. 496.

melarang segala aktivitas PKI. Sesudah keadaan kembali normal, pemimpin-pemimpin PKI berusaha mengonsolidasi partainya dan mulai mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia tidak bersalah. Tokoh-tokoh PKI yang lolos dari hukuman muncul untuk membangun kembali PKI. Lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1955 keadaan politik Indonesia dikejutkan dengan munculnya PKI menjadi kekuatan politik dari empat partai besar setelah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen (dilaksanakan tanggal 29 September 1955) dan Konstituante (dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955). Adapun sistem Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Pemilihan umum 1955 diikuti oleh banyak partai politik yang menganut sistem proporsional dengan tiga aliran ideologi besar yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis.<sup>4</sup> Setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum enam kursi di Konstituante dan tiga di Parlemen.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan saat yang penting bagi Partai Komunis Indonesia. PKI ingin membuktikan eksistensinya sebagai partai politik yang cukup kuat. PKI tidak dibubarkan dan bahkan muncul sebagai pemenang ke-4 dalam Pemilihan Umum 1955. Perolehan suara dalam pemilu 1955 sangat berarti bagi PKI guna memperbaiki citra negatif pasca peristiwa *Madiun Affair*. Perkembangan PKI sangat menakjubkan terbukti yaitu antara bulan Maret dan November 1954 jumlah anggota PKI meningkat tiga kali lipat dari 165.206 menjadi 500.000 dan pada akhir tahun 1955 mencapai jumlah 1.000.000 orang. Sebagian besar massa tersebut terkonsentrasi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.<sup>5</sup> Bagi PKI, hasil itu merupakan suatu yang menakjubkan dan bertolak belakang dengan citra buruk PKI selama itu. Trauma politik pasca peristiwa Madiun 1948

---

<sup>4</sup> Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 98.

<sup>5</sup> M.C. Riclefs, *op.cit.*, hlm. 374.

dan peran PKI dalam aksi mogok sepanjang 1950-1951 ternyata tidak berpengaruh.<sup>6</sup>

Di Yogyakarta sendiri PKI menempati urutan pertama dalam pemilihan umum dengan jumlah 237.870 suara. Perkembangan pesat tersebut dapat diperoleh dengan adanya dukungan dari rakyat pada waktu itu.<sup>7</sup> Sebagian besar suara yang diperoleh berasal dari petani dan buruh. Program-program PKI memang selalu menargetkan golongan ini. Hal tersebut disebabkan karena Yogyakarta merupakan kawasan agraris dimana sebagian besar penduduknya pada masa itu masih menggantungkan hidup pada bidang pertanian. Banyaknya kelompok buruh juga dipandang progresif dan secara umum kondisi hidup mereka kurang baik sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh gerakan yang menjanjikan kehidupan lebih baik.<sup>8</sup>

Untuk keperluan konsolidasi organisasi di Yogyakarta, PKI menggunakan taktik gerakan komunis internasional dengan menggunakan sekelompok elit yang kuat untuk menarik massa. Massa organisasi menurut kelompok sosial secara sistematis seperti wanita, buruh, tani, dan pemuda.<sup>9</sup> Kemenangan yang diraih PKI ini cukup mengejutkan karena peristiwa *Madiun Affair* meninggalkan bekas trauma yang cukup mendalam bagi bangsa Indonesia. Mengingat Yogyakarta merupakan wilayah yang cukup dekat dengan peristiwa tersebut. Kemenangan PKI di Yogyakarta menimbulkan banyak pendapat pada berbagai golongan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang kemenangan PKI, terutama pasca peristiwa Madiun 1948 dan strategi politik PKI dalam menggalang massa pada pemilu 1955 Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 496.

<sup>7</sup> Yudhastawa Mangunsarkoro, *Pemberontakan G30S/PKI di Yogyakarta dan Sekitarnya*, (Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000), hlm. 3

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>9</sup> “*Kedaulatan Rakyat*”, 30 Oktober 1965, hlm. 1

## **B. KEADAAN YOGYAKARTA SEBELUM PEMILU 1955**

Daerah Istimewa Yogyakarta (bahasa Jawa: Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten dan satu kotamadya. Wilayah tersebut ialah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kotamadya Yogyakarta.

Secara astronomis Provinsi Yogyakarta terletak  $7^{\circ}.33'$  -  $8^{\circ}.12'$  Lintang Selatan (LS) dan  $110^{\circ}00'$  -  $110^{\circ}.50'$  Bujur Timur (BT). Tercatat Provinsi Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup> dengan batasan wilayah di sebelah utara yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten, sebelah timur adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas keseluruhan Provinsi Yogyakarta terdiri dari:

- a. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> (18,04%);
- b. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> (15,91%);
- c. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> (46,63%);
- d. Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km<sup>2</sup> (18,40%);
- e. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> (1,02%).

Secara umum, daerah kebudayaan Jawa, termasuk Yogyakarta terbagi menjadi tiga wilayah yaitu daerah perkotaan, daerah pesisir dan daerah pedalaman. Di perkotaan mayoritas anggota masyarakat bekerja sebagai pedagang atau menjadi pegawai dan pekerjaan-pekerjaan lain. Masyarakat Jawa tinggal di desa yang merupakan daerah atau wilayah hukum yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan tingkat daerah paling rendah. Pekerjaan utama masyarakat desa adalah bertani, baik itu mengolah tanah (untuk daerah pedalaman) atau mencari ikan (untuk daerah pesisir).

Penduduk Yogyakarta sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Penduduk ini mengembangkan berbagai macam tradisi Jawa yang dapat digunakan sebagai model untuk melakukan kegiatan. Tradisi tersebut juga menjadi landasan untuk menempatkan kedudukan masyarakat desa dalam struktur sosial. Termasuk dalam tradisi itu yakni tempat manusia dalam masyarakat dan alam yang juga secara konsep merupakan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan politik, kekuasaan dan kekuatan. Tradisi dalam masyarakat Jawa merupakan kumpulan konsep konsep, aturan-aturan dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dalam struktur sosial Jawa.<sup>10</sup>

Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan hal tersebut, muncul klasifikasi sosial di pedesaan didasarkan atas seberapa besar ia menguasai tanah. Menurut keadaan, pertanian di Yogyakarta dapat dibedakan kelas-kelas sosial yang terdiri atas tuan tanah, petani kaya, petani sedang, petani miskin dan buruh tani.

Pertama, tuan tanah adalah pemilik-pemilik tanah mulai dari sepuluh hektar ke atas. Mereka tidak mengerjakannya sendiri, tetapi menyewakannya pada pihak lain dengan sewa berupa uang atau hasil bumi secara bagi hasil. Kedua, petani kaya adalah orang yang memiliki tanah 5-10 hektar, tetapi ia ikut mengerjakan tanahnya sendiri. Meskipun demikian, mereka lebih senang mempekerjakan buruh tani daripada pihak lain dengan bagi hasil. Mereka hidup makmur dari eksploitasi tenaga buruh tani. Ketiga, petani sedang meliputi petani yang memiliki tanah 1-5 hektar. Mereka mengerjakan tanahnya sendiri dengan alat-alat pertaniannya sendiri. Hasil perolehan dari usaha taninya mampu menghidupi keluarga. Keempat, petani miskin dicirikan dengan kepemilikan tanah yang sempit (kurang dari satu hektar). Kehidupannya tidak cukup hanya dari hasil taninya. Petani miskin juga mengerjakan tanah petani kaya atau tuan tanah dengan sistem bagi hasil. Kelima, buruh tani. Mereka pada umumnya tidak memiliki alat produksi sama sekali. Kehidupannya bergantung sepenuhnya pada tenaga yang ia jual kepada para petani kaya. Buruh tani merupakan satu kelas sosial yang

---

<sup>10</sup> Parsudi Suparlan, "*Demokrasi dalam Masyarakat Pedesaan*", (Jakarta: Prisma, 1977), hlm. 65.

merupakan kelas terbawah, yakni pekerja pertanian yang tak memiliki tanah. Tidak ada data makro yang diperoleh untuk bisa menggambarkan besarnya petani tak bertanah (buruh tani).<sup>11</sup> Mereka pada umumnya dipekerjakan oleh para tuan tanah untuk menggarap lahan. Kesenjangan ekonomi yang jauh antara tuan tanah dan buruh tani terkadang memicu kecemburuan sosial.

### C. PERKEMBANGAN PKI YOGYAKARTA TAHUN 1950 – 1955

Pasca *Madiun Affair* berhasil ditumpas dan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Muso, dll berhasil ditangkap dan dihukum mati, pemerintah memutuskan untuk memberi pengampunan kepada anggota PKI yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Bagi anggota PKI yang terbukti telah melanggar hukum, maka sanksi hukum tetap berjalan. Pengampunan yang diberikan oleh pemerintah membuat nama PKI sebagai partai perusuh dan pembuat onar menjadi hilang. Pemutihan nama PKI tersebut mulai diterapkan sejak keputusan pemerintah dikeluarkan setelah memeriksa kegiatan dan keanggotaan PKI secara keseluruhan.<sup>12</sup> Dari pengampunan itu maka PKI sudah bisa beraktifitas seperti biasanya. Setelah PKI diampuni oleh pemerintah, pada awalnya mereka mengalami kesulitan untuk berbaur dengan masyarakat. Hal ini disebabkan rasa trauma dari masyarakat atas apa yang telah dilakukan partai tersebut di Madiun dan sekitarnya.

Partai Komunis Indonesia dapat diterima di Yogyakarta karena masyarakat kelas bawah yang terdiri atas buruh dan petani begitu dominan di wilayah ini. Kondisi tersebut memudahkan PKI menjalankan program-program mereka untuk merebut massa di Yogyakarta. Sikap aktif PKI Yogyakarta dalam propaganda memperjuangkan nasib kaum tani dan buruh berdampak pada sikap simpatik dari masyarakat. Retorika politik PKI selama tahun 1950-an seakan-akan bertemu dengan PKI yang banyak karena disetiap daerah, waktu, atau situasi, PKI akan

---

<sup>11</sup> Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insis, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999), Hlm 126.

<sup>12</sup> Mabes ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid III, Konsolidasi dan Infiltrasi PKI (1950-1959)*, (Jakarta: Pusat Sejarah dan tradisi ABRI, 1995), hlm. 5.



memperkenalkan rumusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi rakyat Indonesia. Satu satunya landasan ideologis yang ditampilkan adalah penguasaan kata “rakyat”. Rakyat adalah PKI, PKI adalah rakyat. Penguasaan kata rakyat merupakan strategi PKI untuk menarik rakyat.<sup>13</sup> Alam Demokrasi Liberal yang berlangsung di Indonesia tahun 1950-an memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupun sebelumnya partai komunis itu telah melakukan pemberontakan. Periode 1950-1955 merupakan suatu babak ketika ingatan tentang revolusi masih segar tetapi kepercayaan akan kehidupan demokrasi yang sehat juga sedang tumbuh dalam masyarakat Yogyakarta.

Menjelang Pemilu 1955, PKI Yogyakarta begitu gencar menggerakkan seluruh kekuatan untuk mendulang suara. Sosialisasi partai dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dengan masyarakat kelas bawah. Yogyakarta merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai golongan petani dan buruh. Golongan masyarakat tersebut mengisi presentase yang cukup tinggi dalam masyarakat Yogyakarta dan menjanjikan perolehan suara yang sangat besar. Banyaknya golongan kelas bawah tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai daerah empuk bagi terlaksananya program-program PKI. Organisasi di bawah naungan PKI bergerak cepat. Melalui *Harian Rakyat* (HR), PKI berupaya membendung opini negatif dan menggalang simpati rakyat dari berbagai golongan. *Harian* ini menggunakan gaya bahasa sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat golongan kelas bawah.

#### **D. STRATEGI PKI DALAM PEMENANGAN PEMILU 1955 DI YOGYAKARTA**

Pasca *Madiun Affair*, Partai Komunis Indonesia (PKI) dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit (D.N Aidit). Kepemimpinan Aidit mengubah gaya PKI yang awalnya beraliran keras dan cenderung konservatif menjadi partai yang lebih terbuka dan demokratis. Langkah awal yang dilakukan Aidit adalah membangun partai melalui konsepsi “Jalan Baru”. Tujuan dari konsep tersebut adalah menunjukkan kepada rakyat bahwa PKI berjuang dengan cara aman, damai, dan

---

<sup>13</sup> Subhan SD, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Buana, 1996), hlm. 13.

demokratis.<sup>14</sup> Cara seperti ini berhasil mendekatkan PKI dengan berbagai macam lapisan masyarakat dan diterima secara politik.

Partai Komunis Indonesia (PKI) berkeinginan untuk mempersatukan kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, pengusaha kecil dan pengusaha nasional. Termasuk yang anti imperialisme dan anti-feodalisme serta semua golongan minoritas dalam organisasi yang terstruktur. PKI juga turut bersinergi dengan kekuatan proletariat internasional, bangsa-bangsa yang terjajah yang mencintai kemerdekaan nasional, demokrasi rakyat dan perdamaian dunia.<sup>15</sup> Kekuatan inilah yang menjadi dasar PKI untuk membangun kembali citra partai yang sebelumnya hancur akibat *Madiun Affair*.

Untuk menyatukan kekuatan tersebut, PKI menggagas program Front Persatuan Nasional. Program ini bertujuan untuk menstabilkan ideologi politik menjelang pemilu dan mempersatukan kekuatan rakyat untuk menghadapi musuh bersama yaitu neokolonialisme. Dalam wadah Front Persatuan Nasional itu sebenarnya seringkali dimanfaatkan oleh golongan komunis untuk mendapat simpati rakyat. Keterlibatan PKI dalam front Persatuan Nasional tidak lain demi kelangsungan partai khususnya, dan golongan komunis di Indonesia umumnya. PKI melihat bahwa orang yang senasib akan merasa dekat satu dengan lainnya. Persamaan nasib antara petani miskin, buruh lepas, dan lapisan menengah kebawah lainnya memberikan rasa persatuan yang erat. Bersatu dalam rangka membentuk suatu kekuatan yang dapat dipergunakan untuk melindungi hak-hak mereka. Persatuan antara buruh tani, rakyat miskin, buruh lepas tersebut telah memenuhi syarat ajaran kepentingan dari Komunisme. Golongan-golongan yang memiliki kepentingan sama akan bersatu membentuk suatu kelompok massa yang besar. Persatuan ini penting untuk membangun kekuatan PKI dalam pentas pemilu.

---

<sup>14</sup> Efantino Febriana, *Alimin & Tan Malaka : Pahlawan yang Dilupakan*, (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2009), hlm. 37.

<sup>15</sup> Subhan SD, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*, (Yogyakarta: Bentang Buana, 1996), hlm. 43.

PKI mulai melakukan propaganda-propaganda dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme, kapitalisme dan anti tuan tanah. PKI memberikan janji-janji kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani miskin akan diberi tanah sebagai milik perseorangan jika PKI menang dalam Pemilihan Umum. Janji-janji muluk PKI kepada petani ini, untuk membujuk mereka agar memilih PKI. Menjanjikan *land reform* dan kepemilikan lahan menjadi salah satu strategi yang baik untuk mendulang suara dari petani. Lahan perkebunan maupun lahan pertanian akan direbut dari para tuan tanah yang akan dijadikan sebagai lahan milik petani.<sup>16</sup> Yogyakarta yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani mendukung berbagai program yang ditawarkan oleh PKI. PKI menjadikan desa-desa sebagai basis partai. Desa-desa dikawasan Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo dijadikan wilayah untuk menyusun kekuatan massa yang besar. Paham komunis tumbuh di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi.

Program-program yang ditawarkan PKI sangat menarik bagi para buruh ditengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Pendekatan PKI pada kaum buruh dilakukan dengan baik dan sistematis. Program-program kampanye PKI yang dilakukan kepada buruh di Yogyakarta adalah :

1. Gaji minimum, kerja 7 jam dan perbaikan jam kerja dan penghidupan buruh.
2. Perlindungan kerja dengan pengakuan hak mogok di antara buruh.
3. Pembagian keuntungan bagi buruh di industri-industri besar.
4. Membentuk majelis-majelis buruh di industri-industri besar.<sup>17</sup>

Massa buruh yang menjadi kekuatan PKI di Yogyakarta sempat melakukan berbagai aksi pemogokan yang berimbas kepada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Buruh industri gula di Madukismo, Industri perak di Kotagede dan industri kreatif lainnya menjadi sasaran utama dalam kampanye PKI menjelang pemilu 1955.

---

<sup>16</sup> Taufik Abdullah, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Pasca Revolusi*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm 62.

<sup>17</sup> Subhan SD, *op.cit.*, hlm. 45.

Melalui sidang Politbiro CC PKI pada tahun 1954, PKI telah merumuskan metode revolusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Metode tersebut dinamakan “Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)”. Metode ini berisi tentang perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan, bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan bersenjata dan perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh dan petani miskin.<sup>18</sup>

Metode tersebut merupakan suatu konsep agresif PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya, menetralisasi lawan-lawan politiknya, serta mencari dukungan yang luas dikalangan rakyat. Sesuai dengan program MKTBP, langkah pertama yang dilakukan PKI adalah perjuangan gerilya di desa-desa. Di desa-desa PKI menggalang kaum petani untuk meraih dukungannya. Kader-kader PKI kemudian mulai masuk ke desa-desa, mengorganisir dan merangsang petani untuk berpikiran revolusioner.

Pada pemilihan umum 1955 untuk memilih calon anggota parlemen yang pertama dilaksanakan kampanye-kampanye. Kampanye itu dinamakan kampanye “Pohon Partai”, “Kebun Partai”, “Ayam Partai”, “Kambing Partai”, artinya pohon, kebun, ayam dihibahkan kepada partai, yang disebarluaskan hingga ke tingkat-tingkat bawah dan dijadikan sebagai tradisi.<sup>19</sup> Cara-cara itulah yang ditempuh PKI untuk merekrut dana, meskipun secara material hasilnya kecil namun secara moral PKI berusaha menebalkan semangat cinta partai pada anggota dan pengikutnya. Tokoh-tokoh PKI Yogyakarta yang turut menjadi juru kampanye antara lain, Sudibjo, Basuki Suparto, Sutrisno, Bosmo Winyoamidjojo, Dirjowijoto, Tjondrokusumo, Djaetun.<sup>20</sup> Tokoh ini menjadi pioner untuk menggalang massa bagi PKI Yogyakarta.

---

<sup>18</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, (Jakarta: 1994), hlm. 37.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, *op.cit.*, hlm. 15.

Slogan-slogan “turunkan sewa tanah”, “turunkan pajak tanah”, “hapuskan kerja rodi”, dan lain sebagainya menjadi ramai di desa-desa. Strategi yang lebih dikenal sebagai strategi “Turun ke desa, hidup , makan, dan bekerja bersama petani” nampaknya efektif untuk propaganda PKI yang bertujuan mengajak orang agar memihak PKI. Propaganda ini diharapkan dapat meyakinkan orang atas tujuan-tujuan PKI. Rakyat menganggap program-program PKI dapat menyelesaikan permasalahan mereka khususnya dalam bidang ekonomi. Propaganda yang dilakukan PKI dengan cara mengadakan kursus-kursus seperti kursus baca tulis, kursus politik bagi penduduk desa dianggap hal yang menarik. Kegiatan kebudayaan seperti wayang, ludruk, dan lainnya juga turut digalakkan oleh PKI. Beberapa cara itu dipakai PKI sebagai alat propaganda dan alat penyalur ideologi partai. Propaganda didasarkan kepada keadaan petani bertujuan memperbaiki keadaan petani.

Kampanye ini memiliki keunikan yang berbeda dengan partai peserta pemilu pada umumnya. Perbedaan antara PKI dan partai-partai lain atau partai pemerintah sendiri adalah tidak ada yang bertindak nyata dan dapat dipahami oleh petani yang berpikinya sederhana. Pelaksanaan kampanye PKI menggunakan tiga tema yang menyentuh emosi masyarakat,

- (1) PKI menampakkan dirinya sebagai pembela Pancasila,
- (2) PKI menampilkan figur Presiden Soekarno,
- (3) PKI menampakkan diri sebagai pembela kaum tertindas.

Propaganda yang menyentuh emosi rakyat ialah adanya pernyataan bahwa satu-satunya calon mereka untuk Presiden adalah Bung Karno. Seolah-olah partai lain tidak menghendaki yang demikian. Pada masa-masa kampanye PKI, foto Presiden Sukarno dipajang dan dibuat dalam ukuran besar. PKI juga menggunakan metode kampanye yaitu kegiatan kesejahteraan sosial. Bagi PKI, kegiatan semacam itu dimaksudkan tidak hanya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk membangun basis massa yang lebih permanen.

## **E. KESIMPULAN**

Kondisi politik di Yogyakarta menjadi hangat ketika keberhasilan pemilu lokal pada tahun 1951. Pemilu lokal tersebut telah mengindikasikan keberhasilan

partai-partai politik dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, menarik perhatian dan kampanye yang dilakukan. Keikutsertaan PKI dalam pemilu 1951 menjadi langkah awal dalam rekonsiliasi partai pasca Madiun Affair. Walaupun kalah, PKI telah dianggap berani melakukan manuver politik. Kestabilan politik Yogyakarta merupakan sebuah pencapaian yang bagus setelah terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan Merapi Merbabu Complex (MMC). Semarak pemilu lokal masih cukup terasa hingga diselenggarakannya pemilu nasional pada tahun 1955.

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang dilakukan di Indonesia. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional. Pemilu dilaksanakan secara serempak di sebagian besar wilayah Indonesia pada tanggal 29 September untuk pemilihan parlemen (DPR) dan tanggal 15 Desember untuk pemilihan Konstituante. Empat partai pemenang Pemilu 1955 di Yogyakarta adalah PKI, disusul oleh PNI, Masyumi dan NU. PKI mendominasi perolehan suara dengan mendapat 237 ribu suara pemilih dengan basis massa berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul.

Menghadapi Pemilu 1955, PKI melakukan pendekatan kepada petani. Strategi PKI menjelang Pemilihan Umum 1955 yaitu menarik petani ke dalam Front Persatuan Nasional. PKI mulai melakukan propaganda-propaganda dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme, kapitalisme dan anti tuan tanah. PKI ingin mewujudkan revolusi sosial di Indonesia, menjadikan masalah pertanahan dan nasib petani sebagai hal yang penting. Polarisasi yang telah dibuat PKI pada perkembangannya menjadi konsepsi PKI dalam melakukan pertentangan kelas antara para tuan tanah dengan buruh tani. PKI fokus untuk melaksanakan program yang intensif di bidang pertanian.

Partai Komunis Indonesia (PKI) begitu lihai dalam memanfaatkan kondisi masyarakat Yogyakarta. Pendekatan yang baik ini mampu membuat masyarakat memberikan dukungan yang besar. Perolehan suara PKI dalam Pemilu 1955 merupakan sesuatu yang menakjubkan karena dengan masa silam PKI ternyata tidak berpengaruh besar terhadap hasil pemilu 1955. PKI berhasil menerapkan strateginya dalam upaya kemenangan pemilihan umum 1955.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

BPAD DIY, *Surat Mendagri kepada Gubernur DIY*, tentang pelaksanaan Pemilihan Umum, 3 Agustus 1955.

\_\_\_\_\_, *Dokumentasi Pemilihan Umum*, berisi tentang Peraturan-Peraturan dan Dasar Hukum.”

### Buku

Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.

Efantino Febriana, Alimin & Tan Malaka : *Pahlawan yang Dilupakan*, Yogyakarta: Bio Pustaka, 2009

Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Gottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, a.b. Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press, 1986.

Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Jusuf Badri, *Inilah Komunisme dan Agama Komunis*, Jakarta: Restu Agung, 2001.

Mabes ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid III, Konsolidasi dan Infiltrasi PKI (1950-1959)*, Jakarta: Pusat Sejarah dan tradisi ABRI, 1995.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insis, KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999.

Parsudi Suparlan, “*Demokrasi dalam Masyarakat Pedesaan*”, Jakarta: Prisma, 1977.

Rickfles MC, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2009.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta: 1994.

Subhan S.D, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*, Yogyakarta: Bentang Buana, 1996.

Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Pemumpasannya*, Jakarta: 1994.

Subhan S.D, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950-1955*, Yogyakarta: Bentang Buana, 1996.

Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Yudhastawa Mangunsarkoro, *Pemberontakan G30S/PKI di Yogyakarta dan Sekitarnya*, Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000.

#### **Surat Kabar**

"*Kedaulatan Rakyat*", 30 Oktober 1965.

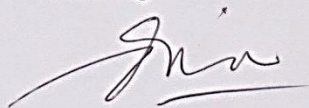
#### **Skripsi**

Tri Basuki, "Dinamika 4 Partai Besar (PNI, PKI, Masyumi, dan NU) dalam Pemilihan Umum 1955 di Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2016.

Uni Ekowati, "Strategi Partai Komunis Indonesia dalam Pemenangan Pemilihan Umum 1955", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2012.

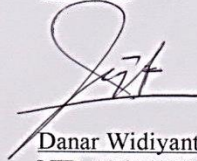
Yogyakarta, 2 November 2016

Pembimbing



Dra. Dina Dwikurniarini, M.Hum  
NIP. 19571209 198702 2 001

Reviewer



Danar Widiyanta, M.Hum  
NIP. 19681010 199403 1 001